

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR SATYA MITRA ANDALAN TAHUN 2017

Latar Belakang

Melewati tahun 2017 serta memasuki tahun 2018, Bank Perkreditan Rakyat Satya Mitra Andalan selanjutnya disebut Bank Satya (sebelumnya dikenal sebagai BPR Cosmic Mitra Andalan), telah melewati fase krusial dimana dalam perjalanan di tahun tersebut terjadi beberapa perubahan cukup signifikan seperti perubahan nama perseroan, alamat (domisili usaha), serta kepengurusan. Semua langkah-langkah perubahan tersebut merupakan satu rangkaian panjang yang dimulai sejak pertengahan tahun 2016. Dalam fase tersebut Bank Satya melakukan efisiensi disemua bagian, efektifitas dalam pekerjaan, serta mereposisi tugas dan wewenang karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Job desk pada unit/bagian tersebut.

Bank Satya berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat secara terus menerus melayani nasabah dengan baik dan terus menjadi semakin baik. Oleh sebab itu Bank Satya harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank Satya menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika (tercantum dalam kode etik) dan *Good Corporate Governance*. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya dan melihat tantangan dan peluang ke depan, Bank Satya tetap menjadikan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam antara Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Provinsi Kepri umumnya dan Kota Batam khususnya. Dimana peningkatan wawasan dan pengetahuan karyawan di sektor Perbankan akan menjadikan Bank Satya unggul atau setidaknya lebih maju dalam hal pelayanan, karena kecendrungan saat ini untuk bunga dan biaya kredit hampir sama dan merata. Tinggal dibutuhkan kreatifitas dan pelayanan optimal untuk memenangi persaingan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Maka Bank Satya tetap mengedepankan lima asas atau pilar utama Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Selain itu meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Semakin baik pelaksanaan dan penerapan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR Satya ke depan.

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara Lokal maupun nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

Kebijakan & Prosedur GCG Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Satya Mitra Andalan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- c. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- d. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah :

1. Undang-Undang

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13./ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Buku Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 – Komite Nasional Kebijakan Governance.

3. Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.

- **Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) aspek berikut :

a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

a.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi. Anggota Direksi lengkap. Untuk Dewan Komisaris belum lengkap sesuai ketentuan (proses pengajuan)

- Komisaris berjumlah 1 (satu) orang
- Penambahan Calon Komisaris sesuai ketentuan dalam tahap pengajuan nama calon.

- Komisaris dan Direksi yang ada saat ini telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Antara Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah mendapat laporan dan evaluasi dari Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank
- Dewan komisaris secara berkala telah melakukan kunjungan terhadap debitur bank (*on the spot*) untuk mengevaluasi fasilitas kredit yang telah diberikan apakah sesuai dengan peruntukannya.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur)

diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3 Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Rekomendasi Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Rekomendasi revisi RKAT PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun 2017
- Rekomendasi RKAT tahun 2017
- Rekomendasi penghapusan kredit macet 2017
- Persetujuan pemberian bonus karyawan 2017
- Persetujuan pembelian inventaris kantor 2017

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Dikaitkan dengan asset bank yang masih di bawah Rp.80.000.000.000,- maka BPR Satya Mitra Andalan tidak membentuk komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. fungsi kepatuhan

- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

c.2. fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik namun masih harus dioptimalkan sesuai SPFAIB.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), untuk selanjutnya akan menuju kepada audit tiga bulanan, Audit semesteran, audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris. Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan manajemen
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

- .Penerapan GCG untuk Manajemen Risiko ini belum berjalan sepenuhnya, karena masih dalam penyusunan dan perumusan SPO. Untuk saat ini pengendalian internal dilakukan berdasarkan Job Description masing masing bagian dan double cross check dari atasan langsung. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern diharapkan akan seutuhnya terlaksana di tahun berikutnya.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPKM

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPKM dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPKM kepada OJK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2016 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (OS)
1	Kepada Pihak Terkait	3	Rp. 562.716.400,-

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018

- Meningkatkan volume penyaluran kredit dan penghimpunan dana, khususnya dana murah dengan pengembangan sistem pemasaran dan produk-produk/ program inovatif
- Meningkatkan feebased income dengan berupaya mengembangkan produk layanan berbasis teknologi.
- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta terus mengembangkan teknologi informasi agar pelayanan kepada nasabah dapat terus diperbaiki.

- Memperbaiki kinerja keuangan dengan meningkatkan pendapatan, control biaya yang lebih terukur serta penyelesaian AYDA dan NPL.
- Mengembangkan struktur organisasi agar alur kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan karyawan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan,
- Menerapkan Tata Kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian manajemen resiko.
- Menjalankan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan Teknologi Informasi dan SOP yang memadai.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Satya Mitra Andalan untuk jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Mengupayakan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM berupa modal kerja dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Rasio LDR per 31 Desember 2016 sebesar 89,33%. Upaya peningkatan ekspansi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Satya Mitra Andalan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit yang berkurang dari tahun sebelumnya yang dilihat dari jumlah Outstanding.

No	OS Kredit	2016	2017	%
1		Rp. 58.384.626.426	Rp. 52.540.589.897,-	-10,01

- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif. Namun terdapat penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya disebabkan penurunan pertumbuhan kredit dan suku bunga kurang kompetitif. Hal ini terlihat dari table di bawah ini.

No	Dana Pihak Ketiga	2016	2017	%
1	Tabungan	Rp. 1.841.180.635,-	Rp. 2.384.751.841,-	29,52
2	Deposito	52.979.874.747,-	Rp. 52.054.919.475,-	-1,75

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah, dapat digambarkan secara umum.

- Meningkatkan penguatan permodalan
- Meningkatkan pangsa pasar dengan pengembangan Brand image.
- Meningkatkan volume usaha dengan memperluas jangkauan layanan dengan ekspansi Kantor Pelayanan kas atau Kantor Cabang BPR.
- Meningkatkan layanan berbasis teknologi dengan menciptakan produk inovatif dan kerjasama pihak ketiga.
- Memelihara loyalitas Nasabah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan bank.
- Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Resiko yang lebih maksimal sesuai dengan peraturan OJK dengan memperkuat lini pengwasan.
- Pengembangan kualitas SDM secara berkesinambungan.

1) Finansial

- Berupaya mencapai pertumbuhan kredit yang diimbangi pertumbuhan dana pihak ketiga untuk menjaga tingkat rasio yang sehat. Untuk tahun 2017, terdapat kenaikan 7,2 %, dimana hal ini

harus menjadi perhatian serius agar tetap berada pada ratio yang sehat dan terkendali.

LDR	2016	2017	pertumbuhan
	88,51 %	92,21%	7,2 %

- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif yaitu dibawah 85 % dengan pelaksanaan efisiensi biaya operasional.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar kredit modal kerja dan konsumen di atas 1.18 %
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Satya Mitra Andalan.

3) Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan
- sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Satya Mitra Andalan melalui *Competency Based Human Resources Management*.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan telah diberlakukan serta SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank yang diharapkan akan segera diberlakukan.
2. Bank sedang melakukan kajian berupa instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan selanjutnya secara bertahap kedepannya akan disajikan pada *Home Page* PT. BPR Satya Mitra Andalan, sesuai dengan ketentuan .

5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Satya Mitra Andalan menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Satya Mitra Andalan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan.

tidak memiliki saham pada PT. BPR lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Satya	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	P,Saham BPR/Prshn Lain	Bidang Usaha
Tri Siska Yuliana	Komisaris	Tidak ada	Accounting & Finance	Tidak ada	Kontraktor Umum
Erwin	Dirut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hendri	Dir rangkap Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri Siska Yuliana	Komisaris		√		√	√			√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Erwin	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Hendri	Direktur Rangkap Kepatuhan		√		√		√		√		√		√

3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakanremunera

si dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 1.197.387.018,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp. 33.101.216,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji,dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dll)	1	Rp. 351.754.386,-	2	Rp. 845.632.632,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/ non natura (fasilitas tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan,dll)		Rp. 3.840.000,-		Rp. 29.261.216,-
Total		108.333.333,-		Rp. 395.990.003,-

Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam 1 tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan :

Tingkat penghasilan dalam 1(satu) tahun	Jumlah direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 500jt-1 miliar	1	-
Rp. 500 juta kebawah	1	1

4. Share Option

Sampai saat ini tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,55 x
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,03 x
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = -
- ratio gaji Direksi yang tertinggi dan komisaris tertinggi = 1,25 x
- ratio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,55 x

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

Rapat Komisaris

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Pembahasan : kinerja usaha bank,RKAT 2017,Implementasi Penerapan Tata Kelola , AYDA	20-01-2017	Komisaris ,Direksi
2	Pembahasan : Kinerja keuangan selama periode I (pertama) 2017,penjualan AYDA & Jaminan Kredit bermasalah,NPL, rencana Hapus Buku, perubahan ketentuan biaya administrasi tabungan, rencana ganti nama,update renovasi gedung baru, rencana pengajuan relokasi	03-04-2017	Komisaris ,Direksi
3	Pembahasan : Tanda tangan specimen & limit penarikan pada cek,bilyet giro (BG),penandatanganan bilyet deposito, ketentuan limit approval biaya, pengajuan token bank,penambahan user sistim USSI (Direksi), laporan-laporan BPR,ketentuan surat-menyurat kepada Instansi/ perusahaan/ pihak-3/ nasabah, penanggungjawab akses khasanah & akses safedeposit box (SDB)maybank, tunjangan handphone,penunjukan konsultan pajak, penindakan terhadap kesalahan pelaporan.	25-09-2017	Komisaris, Direksi
4	Pembahasan : Perkembangan usaha, angka rencana kerja tahun 2017	13-12-2017	Komisaris, Direksi

Data kehadiran rapat Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Jumlah rapat	Jumlah kehadiran	Persentase hadir
1	Tri Siska Yuliana	4	4	100 %

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2017 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

No.	Kasus		Keterangan
	Perdata	Pidana	
1	0		-
2		1	Laporan polisi (penggelapan jaminan fidusia). Perdamaian kedua belah pihak. kasus selesai.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2017 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Satya Mitra Andalan.

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan. periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi GCG sebesar 2.15 dengan predikat Baik
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0.42
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0.40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi Komite	0.00%	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.23
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.28

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.16
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan	7,50%	0.21
	Nilai Komposit	100.00%	2.15
	Predikat Komposit		baik

a. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya sebagian besar SOP GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Satya Mitra Andalan

Tri Siska Yuliana
Komisaris

Erwin
Direktur Utama

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*	PT BPR SATYA MITRA ANDALAN
Alamat BPR*	KOMP RUKO PALM SPRING BLOK B1 NO.7-8 BATAM CENTRE, BATAM
Posisi Laporan*	Desember, 2017
Modal Inti BPR*	Rp9.210.092.486
Total Aset BPR*	Rp68.152.542.284
Bobot Faktor BPR	B

* wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

Terisi	106
Belum terisi	0

SEMPURNA

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	2,14
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,93
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,42	0,40	-	0,22	0,23	0,28	0,06	-	0,16	0,17	0,21	2,14
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan
Faktor 1 : Direksi BPR Satya telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya Faktor 2 : Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. Mengenai jumlah komisaris yang kurang akan dilengkapi sehingga syarat-syarat terwujudnya Tata kelola yang baik terpenuhi Faktor 3 : Jumlah modal inti BPR Satya kurang dari 10 Milyar, sehingga komite audit dan pemantau resiko tidak dibentuk Faktor 4 : BPR Satya telah melakukan langkah-langkah dan upaya kongkrit terhadap pencegahan terjadinya benturan kepentingan Faktor 5 : Fungsi Kepatuhan telah berjalan baik dengan diangkatnya Direktur yang membawahi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan Faktor 6 : Fungsi Audit Internal telah berjalan baik, dengan disertai tahapan yang jelas dimulai dari persiapan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Faktor 7 : Audit Ektern telah dilakukan dengan baik dan kompeten, dimana hasil audit dan management letter disampaikan tepat waktu Faktor 8 : Modal inti kurang dari 50 M Faktor 9 : Pemberian kredit BPR telah sesuai dengan ketentuan BMPK dan laporan telah disampaikan tepat waktu ke OJK Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR dibuat mempertimbangkan faktor-faktor Internal, Eksternal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko Faktor 11 : BPR Satya telah melakukan penyajian laporan melalui sistim pelaporan yang cukup mendukung dan sesuai ketentuan. Terhadap informasi produk, BPR Satya terus mengupayakan langkah-langkah demi terwujudnya transparansi informasi dan pelayanan yang baik kepada konsumen.

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

[illegible]